

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu capaian keberhasilan pemerintah adalah bagaimana pemerintah itu sendiri mengelola hal-hal yang penting seperti hal yang berkaitan dengan aset dan keuangan. Sebelumnya pemerintahan masih menggunakan cara manual dalam sistem pengelolaan aset, hal tersebut seringkali membuat terjadinya kesalahan dalam pencatatan inventarisasi dan perhitungan aset. Kemudian di buat adanya panduan tata pengelolaan barang milik daerah yang menggunakan paradigma baru dalam pengelolaannya aset daerah dengan menggunakan teknologi dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang di dalamnya memuat pengaturan prinsip-prinsip penyelenggaraan SPBE, baik untuk kegiatan administrasi pemerintah maupun sistem layanan publik dengan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efesiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan.

Pemerintah melalui Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), yakni suatu sistem informasi elektronik yang dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah. Dalam sistem informasi elektronik tersebut terdapat salah satu fitur pada sistem informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dalam mengelola aset daerah yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).

Beberapa pemerintah daerah telah memanfaatkan sarana SIMDA BMD dalam pengelolaan aset di daerahnya masing-masing. Berdasarkan rilis data yang disampaikan oleh BPKP melalui situsnya, bahwa sampai tahun 2019 pemanfaatan SIMDA BMD ini sudah diimplementasikan oleh 440 pemerintah

daerah dari 542 pemerintahan daerah yang ada. Pada daftar tersebut, Kabupaten Bekasi sebagai salah satu pemerintah daerah yang sudah memanfaatkan SIMDA BMD dalam mengelola aset daerah di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa selama jangka waktu empat tahun Kabupaten Bekasi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penerimaan penilaian tersebut tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan dan barang milik daerah yang dilakukan oleh Kabupaten Bekasi dengan baik. Akan tetapi, dalam laporan tersebut terdapat permasalahan yang perlu di tingkatkan dalam pengelolaannya yaitu berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bekasi. .



**Table 1. 1****Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah****Tahun 2016-2019**

Tahun	Nama kegiatan	Pagu anggaran	Realisasi anggaran	Capaian kinerja dan anggaran	
				Kinerja (%)	Anggaran (%)
2019	Penatausahaan barang milik daerah	245.000.000	182.520.000	75.00	74.50
	Pengelolaan aplikasi manajemen keuangan daerah	160.000.000	-	-	-
2018	Penghapusan asset pemerintah kabupaten Bekasi	60,000,000	36,423,000	42	61
2017	Persentase tingkat penatausahaan aset	-	-	77,38	77
2016	Persentase tingkat penatausahaan aset	1.288.050.000,00		9,62	16,31

Sumber data: Lakip bpkad kabupaten Bekasi 2016-2019

Berdasarkan data tersebut adanya target yang tidak tercapai pada penatausahaan aset daerah dan pada tahun 2019 tidak adanya realisasi anggaran untuk pengelolaan aplikasi SIMDA. Akan tetapi dalam laporan keuangan kabupaten Bekasi memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperiksa oleh BPK Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut sudah sangatlah baik

namun anggaran yang dioptimalkan dalam realisasinya akan lebih baik setidaknya tercapai diatas 95% .

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut pemerintahan Kabupaten Bekasi menerapkan teknologi informasi dalam mengelola barang milik daerah dengan menggunakan teknologi yang handal dan komprehensif untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban oleh karena itu digunakannya SIMDA BMD yang merupakan langkah untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan pengelolaan barang milik daerah di pemerintahan Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi termasuk kedalam daerah yang telah menggunakan SIMDA BMD untuk mengelola barang milik daerah dan aset daerah. Penggunaan SIMDA BMD juga sebagai upaya pemerintahan daerah untuk mencapai target pada penatausahaan barang milik daerah atau aset daerah. Keberhasilan penggunaan sistem informasi pada organisasi dapat di ukur dari kemudahan dalam penggunaannya dalam mengenali data, mengakses data, dan mengklarifikasi data. Data yang di input pada sistem informasi sudah semestinya data yang sudah tergabung oleh semua instansi terkait agar bisa bermanfaat sebagai kebutuhan oleh organisasi dengan baik

Kemudian pada hasil observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan penggunaannya, Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) masih dikelola oleh beberapa orang saja yang sehingga sedikit yang memahami pengelolaan barang milik daerah dengan menggunakan SIMDA BMD.

Berdasarkan pada uraian di atas dan hasil observasi yang peneliti langsung lakukan dimana masih terdapat kurang optimalnya anggaran untuk operasional SIMDA BMD dan kurangnya sumberdaya manusia yang mengelola SIMDA BMD yang dapat menjadi faktor penghambat keberhasilan dari penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), maka peneliti mengambil judul penelitian: **“Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) Dalam**

## **Pengelolaan Aset Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Bekasi”.**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis paparkan dan didukung dengan data di atas peneliti mengidentifikasi masalah yaitu:

1. Realisasi pada penatausahaan aset daerah yang tidak mencapai target sasaran.
2. Tidak terealisasinya anggaran untuk pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana efektivitas penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi?
2. Apakah kendala dan hambatan dalam penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi?
3. Bagaimana solusi yang dilakukan apabila terjadi kendala dalam penggunaan SIMDA BMD di BPKD Bekasi?

### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi.
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan apabila terjadi kendala dalam penggunaan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi

### **E. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat praktis
  - a. Manfaat untuk peneliti, untuk lebih memahami dan mengembangkan konsep ilmu administrasi publik, terutama yang berkaitan dengan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah

(SIMDA BMD) dan menjadi bahan informasi untuk berhubungan permasalahan yang diteliti.

- b. Pada Institusi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, diharapkan penelitian ini menambah wawasan kajian administrasi publik.
- c. Pada Lembaga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi, diharapkan penelitian ini berperan sebagai kontribusi dan sebagai masukan dalam evaluasi pemerintahan daerah Kabupaten Bekasi.

## 2. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan teori pengelolaan aset daerah terutama dalam aspek penggunaan sistem informasi manajemen pengelolaan aset daerah.

## F. Kerangka Berpikir

Keuangan daerah memiliki lingkup yang terdiri atas yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dikelola langsung adalah APBD dari barang-barang inventaris milik daerah, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi BUMD. (A. Halim, 2008)

Kemudian aset juga menjadi salah satu yang termasuk keuangan daerah, yang mana termasuk kedalam aset daerah yaitu:

- a) semua barang inventaris yang dimiliki pemerintahan daerah.
- b) semua barang hasil kegiatan (proyek) APBN/APBD/LOAN yang telah diserahkan kepada pemerintahan daerah melalui instansi terkait.
- c) semua barang yang secara hukum dikuasai oleh pemerintahan daerah seperti cagar alam, objek wisata, bahan tambang/galian dan sebagainya yang dapat menjadi pendapatan asli daerah yang berkelanjutan dan melakukan pengaturan pemerintah daerah dalam pemanfaatannya. (Suwanda, 2013)

Pemanfaatan sistem informasi ini menjadi sarana pendukung pemerintah daerah untuk mengelola aset daerah khususnya dalam penatausahaannya. Sistem informasi menjadi pendukung pengelolaan data dan pelaporan yang mampu mengakomodir seluruh data aset dan barang milik daerah karena Sistem Informasi Manajemen Daerah ini dirancang dengan fitur perencanaan sampai dengan pelaporan, dengan begitu pegawai bisa mendapatkan output yang berupa informasi dengan cepat dan akurat sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk mengelola aset di waktu mendatang. Sistem informasi manajemen dikembangkan oleh organisasi dengan sasaran utamanya adalah untuk mendapatkan informasi manajemen yang akan digunakan oleh para manajer untuk mengambil keputusan. (Goyal:2003)

Model DeLone & McLean (1992) merupakan sebuah model yang digunakan untuk mengukur kesuksesan sistem informasi yang cukup valid dengan berdasarkan uji teoritis dan empiris, model ini memiliki 6 dimensi yaitu: *system quality, information quality, use, user satisfaction, individual impact, organization impact*. Kemudian pada tahun 2003 DeLone & McLean mengembangkan model ini dengan adanya perubahan yaitu: kualitas pelayanan yang diberikan oleh pengembang sistem informasi tersebut, penambahan minat memakai alternatif dari use dan menggabungkan dampak individu dan dampak organisasi menjadi manfaat-manfaat bersih. Dimensi model DeLone & McLean (2003), yang telah dikembangkan tersebut terdapat 6 yakni: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas layanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat bersih.

Permasalahan yang ada di BPKD Kabupaten Bekasi lebih relevan menggunakan teori DeLone dan McLean karena lebih menekankan pada efektivitas penggunaan SIMDA BMD dalam pengelolaan aset daerah, karena dalam proses penggunaannya dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi yang dihasilkan, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, manfaat benefit baik bagi individu maupun bagi BPKD Kabupaten Bekasi.

**Gambar 1. 1**  
**Kerangka teori**

Model kesuksesan sistem informasi menurut DeLone dan McLean (2003):

1. Kualitas sistem
2. Kualitas informasi
3. Kualitas pelayanan
4. Penggunaan
5. Kepuasan pengguna
6. Manfaat bersih

### **G. Proposisi**

Kesuksesan SIMDA BMD di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bekasi akan terlaksana apabila sudah sesuai dengan karakteristik sebagai berikut: kualitas sistem, kualitas informasi, kualitas pelayanan, penggunaan, kepuasan pengguna, dan manfaat benefit.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG